

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Organisasi Nirlaba**

##### **2.1.1 Pengertian Organisasi**

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1944: 4).

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handyaningrat (1985: 3) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

### 2.1.2 Tipe Organisasi

Menurut Mahsun (2006: 5-6), terdapat empat jenis tipe organisasi, yaitu (1) *pure-profit organization*, (2) *quasi-profit organization*, (3) *quasi-nonprofit organization*, (4) *pure-nonprofit organization*. Berikut ini, penulis uraikan karakteristik dari keempat tipe organisasi diatas:

#### 1. Pure-Profit Organization

Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau memberikan jasa dan/atau barang dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin sehingga para pemilik bisa menikmatinya. Pendanaan dari organisasi ini bersumber dari investor dan kreditor.

#### 2. Quasi-Profit Organization

Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau memberi jasa dan/atau barang dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai target atau capaian lainnya sesuai yang dikehendaki para pemilik. Pendanaan dari organisasi ini bersumber dari investor pemerintah, investor swasta, kreditor dan para anggota.

### 3. Quasi-Nonprofit Organization

Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau memberi barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan (surplus). Pendanaan organisasi ini bersumber dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.

### 4. Pure-Nonprofit Organization

Maksud utama dari organisasi ini adalah menawarkan atau memberikan barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan dari organisasi ini bersumber dari retribusi, pajak, obligasi, hutang, penjualan asset negara, laba BUMN / BUMD, dan sebagainya.

#### **2.1.3 Pengertian Organisasi Nirlaba**

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Komang, 2008).

Karakter dan tujuan dari organisasi nirlaba menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi *profit*. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi *profit* bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia (Komang, 2008).

#### 2.1.4 Area Organisasi Nirlaba

Menurut Mahsun, dkk (2006, 11-12), organisasi nirlaba berada pada area dengan batasan-batasan antara lain:

1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum.
2. Bukan konsumsi individual.
3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat.
4. Harga tidak semata-mata ditentukan mekanisme pasar.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, area organisasi nirlaba berada pada (1) *pure-nonprofit organization* dengan output *pure public goods* (2) *quasi non-profit organization* dengan output

*quasi public goods* dan (3) *quasi profit organization* yang menghasilkan *quasi private goods*.

## **2.2 Organisasi Keagamaan**

### **2.2.1 Pengertian Organisasi Keagamaan**

Entitas dan akuntansi berkaitan erat, hal ini dikarenakan dalam salah satu asumsi dasar akuntansi terdapat asumsi entitas akuntansi (Halim, 2012:453). Asumsi entitas akuntansi menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntasikan adalah berkaitan dengan entitas yang dilaporkan (Halim, 2008). Setiap tempat ibadah pasti memiliki transaksi keuangan, oleh karena itu tempat peribadatan harus dimaknai sebagai suatu entitas atau organisasi.

Menurut Bastian (2007) dalam Halim (2012: 453) organisasi tempat ibadah merupakan organisasi keagamaan. Secara estimologis, organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu.

### **2.2.2 Tujuan Organisasi Keagamaan**

Menurut Bastian (2007) dalam Halim (2012: 454) tujuan dari organisasi keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktifitas yang dibutuhkan maupun yang

telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi yang bersangkutan.

Meskipun tujuan utama organisasi keagamaan adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadahi yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut, seta menunjang tujuan lainnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan dan pendidikan (Halim, 2012: 455).

Kebanyakan pengelola dan pengurus organisasi keagamaan belum menyadari pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satu usaha untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah dengan menciptakan akuntabilitas yang baik dengan menyelenggarakan praktik akuntansi. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, dalam bentuk lengkap maupun secara sederhana.

### **2.2.3 Gereja**

Menurut Sukoco (2006: 22) Gereja adalah kehidupan bersama religius kristiani yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang didalamnya Roh Kudus bekerja dalam

rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Ada dua sisi yang dipakai untuk memahami mengenai gereja, yaitu:

#### 1. Sisi Ilahi

Dalam sisi ilahi, gereja diyakini sebagai “buah pekerjaan penyelamatan Allah”. Allah mengasihi gereja dan menguduskannya untuk menjadi milik kepunyaan-Nya. Allah memperdulikan gereja, memelihara gereja, dan menerima segala sesuatu yang dipersembahkan oleh orang-orang percaya kepada-Nya di dalam dan melalui kehidupan gereja.

#### 2. Sisi Manusiawi

Dalam sisi manusiawi, gereja sebagai suatu kehidupan bersama religious yang diciptakan dan dijalani oleh manusia untuk menjawab penyelamatan Allah.

### **2.3 Laporan Keuangan**

#### **2.3.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern maupun ekstern. Dilihat dari sisi

manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahsun dkk, 2006: 123).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Mahsun dkk (2006: 127-143) tujuan laporan keuangan adalah untuk melakukan kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas, dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, serta sumber fakta dan gambaran.

### **2.3.2 Keuangan Paroki**

Menurut Mahsun dkk (2007), keuangan paroki adalah uang dan harta benda paroki yang berasal dari kolekte, amplop persembahan, sumbangan dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan peraturan Gereja yang berlaku, dimana tanggung jawab



pengelolaannya berada langsung dan personal ditangan Pastor Kepala Paroki, serta pengelolaannya dijalankan oleh Pastor Kepala Paroki dengan dibantu oleh Bendahara Paroki. Harta benda paroki diperoleh melalui pembelian, penghasilan, kolekte, amplop persembahan, derma, pemberian dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip kristiani dan peraturan Gereja yang berlaku. (Keuskupan Agung Semarang, 1991 : 8). Tanggung jawab pengelolaan harta benda Paroki berada ditangan Pastor Paroki.

### **2.3.3 Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP)**

#### **KEPUTUSAN USKUP KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG**

**No.:0010/C/I/a-4/08 tentang**

#### **PEDOMAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI**

#### **BAB III**

#### **Pasal 5**

#### **Kewajiban Paroki Dalam Hal Keuangan**

- 1.1. Setiap Paroki berupaya mandiri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan rutin, program, dan pengembangan.
- 1.2. Dengan semangat *sense of belonging* Paroki meningkatkan semangat menjalin solidaritas antar umat seiman dan antar paguyuban umat seiman yang juga menjadi kesukaan bagi orang-orang lain.

- 1.2.1. Ungkapan solidaritas pertama-tama diwujudkan dalam pengiriman Dana Solidaritas Paroki dan Kolekte Khusus kepada Keuskupan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 1.2.2. Ungkapan solidaritas yang lain diwujudkan dalam program kerja yang menjawab keprihatinan kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir.
- 1.3. Paroki wajib bertindak sebagai administrator yang baik dalam:
  - 1.3.1. Perhitungan Dana Solidaritas Paroki
  - 1.3.2. Pengumpulan Dana APP, Kolekte Umum, Kolekte Khusus, dan Sumbangan untuk kepentingan Gereja Regional atau kepentingan Gereja Universal yang telah ditetapkan oleh Uskup.
  - 1.3.3. Penyaluran dana/bantuan/subsidi dari segenap pihak yang berkehendak baik kepada umat atau segenap pihak yang membutuhkan.
- 1.4. Paroki wajib menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dengan sistem yang ditentukan oleh Keuskupan Agung Semarang.
- 1.5. Paroki mengirimkan kepada Keuskupan laporan keuangan dan dana yang diwajibkan secara utuh dan tepat waktu.

## **Pasal 6**

### **Hak Paroki Dalam Hal Keuangan**

2.1 Paroki berhak menyuarkan kebutuhan keuangannya, dalam rangka mengupayakan kesejahteraan umat dan masyarakat sekitar, kepada seluruh Umat, Keuskupan, Lembaga Gerejawi, dan Lembaga Donor yang lain.

2.2 Dalam menyuarkan kebutuhan keuangan tersebut, Paroki harus melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

2.3 Paroki berhak meminta bantuan keuangan dari Keuskupan dan lembaga donor sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Keuskupan atau masing-masing lembaga donor.

2.4 Paroki berhak mendapatkan layanan administrasi keuangan dalam hubungannya dengan Keuskupan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

## **Pasal 7**

### **Penanggungjawab Keuangan Paroki**

3.1 Secara legal-formal penanggungjawab keuangan Paroki dalah PGPM Paroki.

3.2 Pengelola keuangan Paroki adalah Bendahara Dewan Paroki, sedangkan pengelola keuangan Stasi adalah Bendahara Stasi.

3.3 Apabila dipandang perlu, Paroki/Stasi dapat membentuk Tim Akuntansi yang bertugas memberikan pendampingan/bimbingan penyelenggaraan proses akuntansi Paroki/Stasi dan beranggotakan umat yang paham akuntansi.

## **Pasal 8**

### **Penyimpanan Uang**

8.1 Penyelenggaraan penyimpanan uang berprinsip:

8.1.1 Likuiditas berarti mengutamakan kelancaran pembayaran.

8.1.2 Keamanan dan administratif yang berarti tidak mudah hilang atau diselewengkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative yang kontinyu.

8.1.3 Efisien dan efektif yang berarti tidak membiarkan uang berhenti (*idle cash*) dan menghindari penggunaan uang yang tidak wajar.

8.2 Tata cara penyimpanan uang

8.2.1 Kas (uang tunai di tangan) hanya boleh disimpan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

8.2.2 Saldo rekening bank dalam bentuk tabungan dan giro harus dibatasi sesuai dengan proyeksi pembayaran dan kelebihan atas jumlah tersebut harus diinvestasikan dalam bentuk deposito atau jenis investasi lain yang diputuskan dalam rapat Dewan Paroki/Stasi harian dan disetujui oleh Uskup.

8.3 Penyimpanan uang dalam Tabungan, Giro, dan Deposito:

8.3.1 Untuk Paroki, Paroki Administratif, dan Stasi yang sah sebagai badan hukum public, rekening tabungan/giro atau deposito harus dibuka atas nama PGPM yang bersangkutan dengan kuasa pengambilan yang melibatkan minimal 2 orang anggota pengurus.

8.3.2 Untuk Paroki Administratif, dan Stasi yang belum sah sebagai badan hukum public, rekening tabungan/giro dan deposito harus dibuka atas nama PGPM Paroki dengan kuasa pengambilan yang melibatkan minimal 2 orang anggota pengurus Paroki Administratif atau Stasi.

8.3.3 Bank yang digunakan untuk menyimpan uang harus mengakui kewenangan Uskup sesuai pasal 3.9

## **Pasal 9**

### **Penggunaan Uang**

9.1 Penggunaan uang harus sesuai dengan prinsip umum dan kriteria yang tercantum.

9.2 Penggunaan uang harus direncanakan dalam RAPB dan RAI.

## **Pasal 10**

### **Sumber Keuangan**

#### **10.1 Sumber Keuangan**

10.1.1 Kolekte Umum dan Persembahan setelah dikurangi kewajiban setor Dana Solidaritas Paroki.

10.1.2 Duapuluh lima persen (25%) dana APP.

10.1.3 Kolekte khusus yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu berdasarkan keputusan Uskup.

10.1.4 Persembahan khusus yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Dewan Paroki.

10.1.5 Sumbangan Bebas.

10.1.6 Sumbangan dengan maksud tertentu.

10.1.7 Subsidi dan Keuskupan, Lembaga Gerejawi dan Lembaga Donor yang lain.

10.1.8 Usaha pengumpulan uang yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Dewan Paroki.

10.2 Setiap usaha penggalangan dana pada tingkat Paroki harus disetujui oleh Dewan Paroki.

10.3 Sumber keuangan harus direncanakan dalam RAPB dan RAI tahunan.

## 2.4 Akuntabilitas

### 2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tindakan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas perbuatan seseorang atau sekelompok orang kepada masyarakat dalam suatu organisasi (Syarudin Rasul, 2002 : 8).

Akuntabilitas merupakan pola sikap pertanggungjawaban yang memiliki sifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) merupakan bentuk tanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat luas menurut Bastian (dalam Setiawan, 2014).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut menurut Renyowijoyo (dalam Setiawan, 2014).

Menurut Bowen (dalam Kemenkeu, 2019) terdapat 3 fungsi akuntabilitas publik, yaitu :

1. Sebagai alat kontrol demokrasi.
2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Dengan adanya akuntabilitas, maka istilah “*power trend to corrupt*” dapat dihindarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian internal, mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.

Menurut Sedarmayanti (dalam Nisa, 2017) mengatakan pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas – asas dalam akuntabilitas yaitu :

1. Komitmen pimpinan dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3. Berorientasi pada pencapaian misi dan visi dan hasil manfaat yang diperoleh.
4. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif.



Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemegang keputusan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

Adanya asas dalam akuntabilitas maka terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan akuntabilitas yaitu:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif dan ekonomis, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### 2.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Rosjidi (2001), akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:

#### 1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

#### 2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

### 2.4.3 Akuntabilitas di Organisasi Keagamaan

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dari tanggungjawab. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan tanggungjawab merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian (Simanjuntak dan Junarsi, 2011).

Entitas keagamaan seperti Masjid, Gereja, dan Vihara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang termasuk dalam jenis organisasi *non-profi*. Namun demikian, Simanjuntak dan Junarsi (2011) menjelaskan bahwa tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dimana dalam konteks entitas keagamaan, akuntabilitas vertikal merupakan bentuk tanggungjawab kepada Tuhan. Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan (*the will of God*) (Triuwono:2003). Ini artinya, bahwa manusia memiliki kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kemudian, akuntabilitas horizontal dalam konteks keagamaan merupakan

akibat dari hubungan antara *agent* (manajemen) kepada masyarakat (*stakeholder*) dan alam (*universe*) (Triyuwono:2003). Hubungan tersebut mengharuskan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang terkait (*stakeholder*) dan alam sekitar (*universe*).

## 2.5 Transparansi

### 2.5.1 Pengertian Transparansi

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:7), transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality standardization, efficiency time, and cost*). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan.

Transparansi menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung (*directly accessible*) kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan, kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah untuk dipahami, sistem yang transparan memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan publik. Kemudian adanya saluran komunikasi informasi antara *stakeholders* dan birokrat.

Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara terbuka. Hal tersebut berarti memperbolehkan para *stakeholders* untuk memperoleh informasi. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan untuk memperoleh informasi.

### **2.5.2 Dimensi Transparansi**

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

### **2.5.3 Karakteristik Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2002:19) karakteristik transparansi yang harus dipenuhi meliputi:

1. *Informativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. *Openness* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik ini harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel	Metode Analisa dan Alat Analisa	Hasil
1.	Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tana Toraja)	Randa 2011	Akuntabilitas	Metode penelitian interpretif dan etnografi. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik akuntabilitas tata kelola harta benda sudah lebih baik.</li> <li>2. Praktik akuntabilitas tata kelola harta benda di jalankan dengan setengah hati</li> <li>3. Pastor menjadi sentral dan otoritas dalam mengelola harta benda gereja di tingkat Paroki.</li> </ol>

					4. Perlu mengoptimalkan fungsi Dewan Keuangan yang telah dibentuk di Paroki.
2.	Akuntabilitas Gereja Dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewarship Theory (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur)	Franchisca Sukmawati 2016	Akuntabilitas, perspektif alkitabiah, teori stewarship	Pendekatan kualitatif observasi, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	1. Akuntabilitas vertikal yang dilakukan Gereja X dengan mengelola kas gereja sudah dilakukan dengan jujur dan penuh tanggungjawab. 2. Akuntabilitas horizontal dilakukan dengan cara publikasi laporan keuangan dalam warta jemaat.
3.	Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Kasus	Eva Novita Sari 2018	Akuntabilitas	Metode kualitatif, teknik pengumpulan	1. Akuntabilitas dalam bentuk pelaporan keuangan gereja



	di Gereja Kristen Jawa Temon)			data wawancara dan dokumentasi.	memiliki bentuk yang sederhana dan tidak rumit. 2. Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan PSAK No. 45
4.	Mengungkap Praktik Akuntabilitas Dalam Organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu	Vheny Manguma 2019	Praktik akuntabilitas	Metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	1. Akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan sudah dilakukan dengan transparan. 2. Akuntabilitas transcendental sudah dilakukan dengan baik dengan cara melayani sesama. 3. Akuntabilitas horizontal sudah dilakukan dengan baik dalam bentuk diakonia.

					4. Wujud dari akuntabilitas transcendental dan horizontal dinyatakan dalam alokasi anggaran.
5.	Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan Pusat Pengembangan Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten)	Rahel Eka Saputri 2020	Akuntabilitas, Transparansi	Metode kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik akuntansi dan akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik.</li> <li>2. Penerapan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban di PPA GAT-IO 746 belum terlaksana secara menyeluruh.</li> <li>3. Dimensi akuntabilitas terhadap penerapan akuntabilitas sudah diterapkan secara menyeluruh.</li> </ol>

					4. Penerapan transparansi dalam pertanggungjawaban PPA GAT-IO 746 belum terlaksana secara menyeluruh.
--	--	--	--	--	---

